

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2016

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR
LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616
Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570
e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LUBUK LINGGAU, 17 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kata Pengantar..... | Error! Bookmark not defined. |
| Daftar Isi..... | Error! Bookmark not defined. |
| Pernyataan Tanggung Jawab | Error! Bookmark not defined. |
| Ringkasan | Error! Bookmark not defined. |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | Error! Bookmark not defined. |
| II. Neraca | Error! Bookmark not defined. |
| III. Laporan Operasional..... | Error! Bookmark not defined. |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | Error! Bookmark not defined. |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | Error! Bookmark not defined. |
| A. Penjelasan Umum | Error! Bookmark not defined. |
| A.1. Dasar Hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau..... | Error! Bookmark not defined. |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... | Error! Bookmark not defined. |
| A.4. Basis Akuntansi | Error! Bookmark not defined. |
| A.5. Dasar Pengukuran | Error! Bookmark not defined. |
| A.6. Kebijakan Akuntansi..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran..... | Error! Bookmark not defined. |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah | Error! Bookmark not defined. |
| B.2. Belanja..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | Error! Bookmark not defined. |
| C.1. Aset Lancar | Error! Bookmark not defined. |
| C.2. Aset Tetap | Error! Bookmark not defined. |
| C.3. Piutang Jangka Panjang..... | Error! Bookmark not defined. |
| C.4. Aset Lainnya | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| C.5. | Kewajiban Jangka Pendek | Error! Bookmark not defined. |
| C.6. | Ekuitas | Error! Bookmark not defined. |
| D. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | Error! Bookmark not defined. |
| D.1. | Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |
| D.2. | Beban Pegawai | Error! Bookmark not defined. |
| D.3. | Beban Persediaan | Error! Bookmark not defined. |
| D.4. | Beban Jasa..... | Error! Bookmark not defined. |
| D.5. | Beban Pemeliharaan | Error! Bookmark not defined. |
| D.6. | Beban Perjalanan Dinas | Error! Bookmark not defined. |
| D.7. | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | Error! Bookmark not defined. |
| D.8. | Beban Bantuan Sosial..... | Error! Bookmark not defined. |
| D.9. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | Error! Bookmark not defined. |
| D.10. | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | Error! Bookmark not defined. |
| D.11. | Beban Lain-lain..... | Error! Bookmark not defined. |
| D.12. | Kegiatan Non Operasional | Error! Bookmark not defined. |
| D.13. | Pos Luar Biasa | Error! Bookmark not defined. |
| E. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas..... | Error! Bookmark not defined. |
| E.1. | Ekuitas Awal | Error! Bookmark not defined. |
| E.2. | Surplus (defisit) LO | Error! Bookmark not defined. |
| E.3. | Koreksi Nilai Persediaan..... | Error! Bookmark not defined. |
| E.4. | Koreksi Aset Tetap | Error! Bookmark not defined. |
| E.5. | Koreksi atas Beban | Error! Bookmark not defined. |
| E.6. | Koreksi atas Pendapatan..... | Error! Bookmark not defined. |
| E.7. | Ekuitas Akhir..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. | Pengungkapan Penting Lainnya | Error! Bookmark not defined. |
| F.1. | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca | Error! Bookmark not defined. |
| F.2. | Pengungkapan Lain-lain | Error! Bookmark not defined. |
| | Lampiran dan Daftar | Error! Bookmark not defined. |

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570 e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LUBUK LINGGAU, 17 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.385.053 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp6.097.965.562 atau mencapai 97,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6235.147.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.868.089.337, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp3.148.180; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.864.941.157; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.868.089.337.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.497.053, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.152.292.707, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.140.795.654), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0, dan surplus(defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(6.140.795.654).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp2.132.682.137, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(6.140.795.654), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp789.024.835, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.087.178.019, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp2.868.089.337.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Ungkapan lain : transaksi jurnal terkait belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (peralatan dan mesin yang belum diregister) karena belanja barang berupa gorden menggunakan akun belanja barang persediaan dengan nomor spm 00039 dengan nomor sp2d 160701301000669 tanggal 27 mei 2016, seharusnya dicatat sebagai aset menggunakan akun 523111 tidak bisa dilakukan revisi sehingga dilakukan jurnal penyesuaian terhadap akun tersebut.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

| | Uraian | Catatan | TA 2016 | | | TA 2015 |
|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| A. | Pendapatan Negara dan Hibah | B.1 | 0 | 15.385.053 | 0,00 | 12.772.684 |
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1 | 0 | 15.385.053 | 0,00 | 12.772.684 |
| | Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah | | 0 | 15.385.053 | 0,00 | 12.772.684 |
| B. | Belanja Negara | B.2 | 6.235.147.000 | 6.097.965.562 | 97,80 | 5.629.264.135 |
| 1. | Belanja Pegawai | B.2.1. | 5.194.977.000 | 5.083.395.200 | 97,85 | 5.629.264.135 |
| 2. | Belanja Barang | B.2.2. | 932.170.000 | 906.795.362 | 97,28 | 737.683.237 |
| 3. | Belanja Modal | B.2.3. | 108.000.000 | 107.775.000 | 99,79 | 89.590.000 |
| | Jumlah Belanja Negara | | 6.235.147.000 | 6.097.965.562 | 97,80 | 5.629.264.135 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| C.1 | | | |
| Kas dan Bank | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1. 1. | 0 | 0 |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi | C.1. 2. | 3.164.000 | 3.888.000 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi | C.1. 3. | (15.820) | (19.440) |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | C.1. 4. | 3.148.180 | 3.868.560 |
| Jumlah Aset Lancar | | 3.148.180 | 3.868.560 |
| Aset Tetap | | | |
| C.2 | | | |
| Tanah | C.2. 1. | 1.164.639.000 | 1.164.639.000 |
| Peralatan dan Mesin | C.2. 2. | 1.303.725.854 | 1.232.629.854 |
| Gedung dan Bangunan | C.2. 3. | 2.267.452.450 | 2.267.452.450 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.2. 4. | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2. 5. | 188.882.950 | 1.951.181 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | C.2. 6. | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2. 7. | (2.059.759.097) | (2.537.832.288) |
| Jumlah Aset Tetap | | 2.864.941.157 | 2.128.840.197 |
| Piutang Jangka Panjang | | | |
| C.3 | | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi | C.3. 1. | 0 | 3.164.000 |
| Penyisihan Piutang tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi | C.3. 2. | 0 | (15.820) |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | 0 | (3.148.180) |
| Aset Lainnya | C.4 | | |
| Aset Lain-Lain | C.4. 1. | 51.679.000 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4. 2. | (51.679.000) | 0 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 0 | 0 |
| Jumlah Aset | | 2.868.089.337 | 2.135.856.937 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.5. 1. | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban | | 0 | 0 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas Dana Lancar | C.6 | | |
| Jumlah Ekuitas Dana | | 2.868.089.337 | 2.132.682.137 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | | 2.868.089.337 | 2.132.682.137 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| Kegiatan Operasional | | | |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | D.1 | 11.497.053 | 12.124.684 |
| Jumlah Pendapatan | | | |
| Beban | | | |
| Beban Pegawai | D. 2 | 5.083.395.200 | 4.801.990.898 |
| Beban Persediaan | D. 3 | 69.188.250 | 75.956.300 |
| Beban Barang dan Jasa | D. 4 | 352.201.697 | 315.327.687 |
| Beban Pemeliharaan | D. 5 | 379.893.815 | 258.553.000 |
| Beban Perjalanan Dinas | D. 6 | 87.336.800 | 88.616.850 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D. 7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D. 8 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D. 9 | 180.296.385 | 145.099.631 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D. 10 | (19.440) | 35.260 |
| Beban Lain-lain | D. 11 | 0 | 0 |
| Jumlah Beban | | 6.152.292.707 | 5.685.579.626 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (6.140.795.654) | (5.673.454.942) |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | D. 12 | 0 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Defisit Selisih Kurs | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | | | |

| Pos Luar Biasa | D. 13 | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | (6.140.795.654) | (5.665.754.942) |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Ekuitas Awal | E. 1 | 2.132.682.137 | 2.058.349.828 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | E. 2 | (6.140.795.654) | (5.665.754.942) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar | | | |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas | | | |
| Penyesuaian Nilai Aset | E. 3 | 0 | (2.404.200) |
| Koreksi Nilai Persediaan | E. 4 | 0 | 0 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E. 5 | 182.334.259 | 0 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | E. 6 | 606.690.576 | 0 |
| Koreksi Lain-lain | E. 7 | 0 | 0 |
| Jumlah Lain-lain | | 0 | 0 |
| Transaksi Antar Entitas | E. 8 | 6.087.178.019 | 5.742.491.451 |
| Ekuitas Akhir | | 2.868.089.337 | 2.132.682.137 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Effisien.

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Effisien.

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Meningkatnya penyelesaian perkara
3. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Hukum melalui tindakan penegakan Hukum.
5. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
6. Tersedianya dukungan management dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
8. Peningkatan penataan arsip (in aktif)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun |

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp15.385.053*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 15.385.053 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 4.623.410 | 0,00 |
| 2. | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara | 0 | 3.888.000 | 0,00 |
| 3. | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 0 | 6.873.643 | 0,00 |
| Total Pendapatan | | | 15.385.053 | 0,00 |

1. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
2. menurunnya pendapatan jasa giro bank

Perbandingan realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2016 | 2015 | Perubahan | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Rp | % |
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 4.623.410 | 2.466.494 | 2.156.916 | 87,44 |
| 2. | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara | 3.888.000 | 648.000 | 3.240.000 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3. | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 6.873.643 | 9.658.190 | (2.784.547) | (28,83) |
| Total Pendapatan | | 15.385.053 | 12.772.684 | 2.612.369 | 0,00 |

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
6.097.965.562*

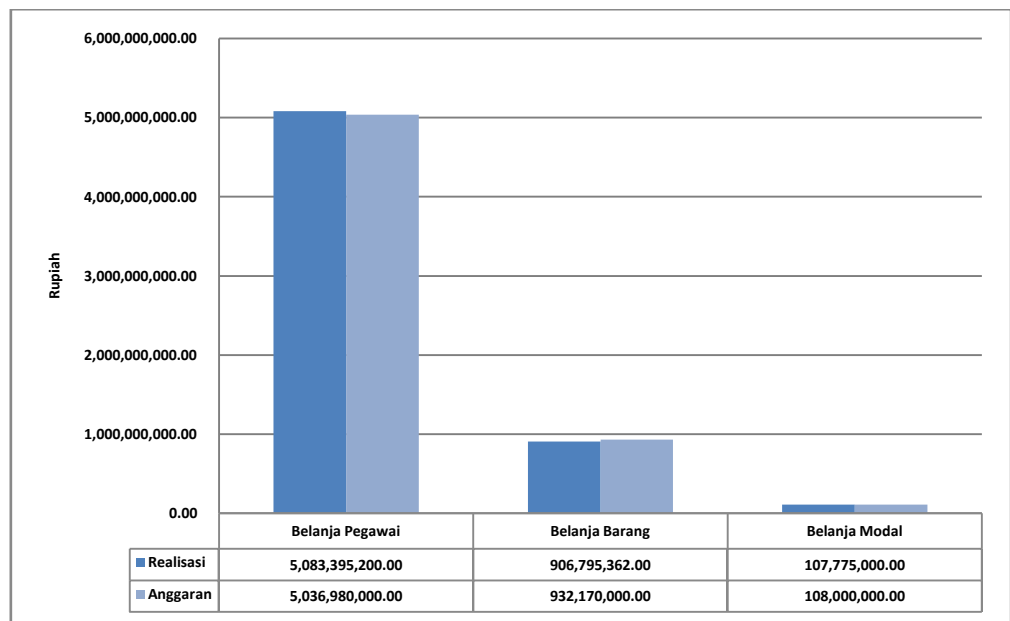
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 6.097.965.562 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100,34% dari anggaran senilai Rp. 6.077.150.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember TA 2016 | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 5.194.977.000 | 5.083.395.200 | 97,85 |
| Belanja Barang | 803.346.000 | 779.695.562 | 97,06 |
| Belanja Modal | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| Total Belanja Bruto | 6.008.323.000 | 5.873.090.762 | 100,34 |
| Pengembalian Belanja | | (60) | 0 |
| Total Belanja Netto | 6.008.323.000 | 5.873.090.762 | 100,34 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

1. Adanya realisasi belanja modal yaitu pengadaan Alat pengolah data sebesar Rp.98.000.000
2. Realisasi Belanja Modal pengadaan AC Rp.10.000.000
3. Meningkatnya kebutuhan keperluan pokok perkantoran
4. realisasi Belanja uang lembur

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik (Turun) | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Pegawai | 5.083.395.200 | 4.801.990.898 | 281.404.302 | 5,86 |
| Belanja Barang | 829.407.212 | 649.066.387 | 169.112.125 | 22,92 |
| Belanja Modal | 107.775.000 | 49.940.000 | 18.185.000 | 20,29 |
| Total Belanja | 6.020.577.412 | 5.500.997.285 | 468.701.427 | 8,32 |

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
5.083.395.200

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 5.083.395.200 dan Rp. 4.801.990.898.

1. Adanya realisasi Belanja Pegawai Uang Lembur

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 1.860.607.440 | 1.653.583.000 | 207.024.440 | 12,51 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 25.182 | 22.469 | (4.306) | (14,60) |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 133.984.160 | 136.654.120 | (2.669.960) | (1,95) |
| Beban Tunj. Anak PNS | 39.897.556 | 36.358.098 | 3.539.458 | 9,73 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 31.590.000 | 26.130.000 | 5.460.000 | 20,89 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 2.258.290.000 | 2.254.800.000 | 3.490.000 | 0,15 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 265.217.622 | 297.146.131 | (31.928.509) | (10,74) |
| Beban Tunj. Beras PNS | 102.474.300 | 96.588.280 | 5.886.020 | 6,09 |
| Beban Uang Makan PNS | 291.156.000 | 278.078.800 | 8.245.000 | 2,91 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 24.280.000 | 22.630.000 | 1.650.000 | 7,29 |
| Beban Uang Lembur | 75.873.000 | 0 | 75.873.000 | 0,00 |
| Total Belanja Brutto | 5.083.395.260 | 4.801.990.898 | 276.565.143 | 5,75 |
| Pengembalian Belanja | (60) | (4.839.219) | 4.839.159 | (100,00) |
| Total Belanja Netto | 5.083.395.200 | 4.801.990.898 | 281.404.302 | 5,86 |

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp906.795.362

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 906.795.362 dan Rp. 737.683.237.

1. Peningkatan belanja keperluan pokok perkantoran
2. peningkatan belanja barang konsumsi

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Perubahan | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------|
| | Realisasi | Realisasi | Rp | % |
| Belanja Barang Operasional | 223.020.120 | 218.947.100 | 8.253.020 | 3,76 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Barang Non Operasional | 39.763.000 | 11.502.500 | 28.260.500 | 245,69 |
| Belanja Jasa | 92.593.377 | 88.611.037 | 3.982.340 | 4,49 |
| Belanja Pemeliharaan | 386.693.915 | 251.230.000 | 131.283.915 | 52,25 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 87.336.800 | 88.616.850 | (1.280.050) | (1,44) |
| Total Belanja Brutto | 829.407.212 | 737.683.237 | 169.112.125 | 22,92 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 829.407.212 | 737.683.237 | 169.112.125 | 22,92 |

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp107.775.00
0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 107.775.000 dan Rp. 89.590.000.

1. Adanya realisasi belanja modal yaitu pengadaan Alat pengolah data sebesar Rp.98.000.000
2. Realisasi Belanja Modal pengadaan AC Rp.10.000.000

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Perubahan | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Modal Peralatan & Mesin | 107.775.000 | 89.650.000 | 68.125.000 | 99,12 |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan | 0 | 49.940.000 | (49.940.000) | (100,00) |
| Total Belanja Brutto | 107.775.000 | 89.590.000 | 18.185.000 | 20,29 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 107.775.000 | 89.590.000 | 18.185.000 | 20,29 |

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
(16.960.660)

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. (16.960.660) dan Rp. 1.483.800.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi | 3.164.000 | 3.888.000 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) | 15.820 | 19.440 |
| Persediaan | 0 | 0 |
| Total Aset Lancar | 3.179.820 | 3.907.440 |

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 424.100

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis | 31 Desember TA 2016 | 31 Desember TA 2015 |
|-----|-------|---------------------|---------------------|
|-----|-------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--------|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 |
|--------|---|---|

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang persediaan

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi: Rp 0*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.164.000 dan Rp. 3.888.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember TA 2016

| No. | Uraian | 31 Desember TA 2016 | 31 Desember TA 2015 |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
| | Jumlah | 3.164.000 | 3.888.000 |

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Saldo per 31 Desember 2015 | 3.888.000 |
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 3.164.000 |

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Bagian Lancar
TP/TGR : Rp
19.440*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.820 dan Rp. 19.440. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. , sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 0

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (dalam satuan Rupiah)

| No. | Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | Penyisihan (%) | Nilai Penyisihan |
|--------------|---------|----------|---------------|----------------|------------------|
| Total | | | | | 19.440 |

C.1.4. Persediaan

*Persediaan:
Rp(17.404.200)*

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember 2015

| No. | Uraian | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Barang Konsumsi | 0 | 0 |
| 2 | Amunisi | 0 | 0 |
| 3 | Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| 4 | Suku Cadang | 0 | 0 |
| 5 | Pita Cukai, Materai dan Leges | 0 | 0 |
| 6 | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 |
| 7 | Bahan Baku | 0 | 0 |
| 8 | Barang dalam Proses | 0 | 0 |
| 9 | Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 |
| 10 | Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 |
| 11 | Persediaan lainnya | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 |

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
2.981.358.174*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji sebesar Rp. 2.981.358.174 dan Rp. 2.058.349.828. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Perubahan |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Tanah | 1.164.639.000 | 1.164.639.000 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.303.725.854 | 1.232.629.854 | 71.096.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2.267.452.450 | 2.267.452.450 | 0 |
| 4 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 188.882.950 | 1.951.181 | 186.931.769 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 4.924.700.254 | 4.666.672.485 | 258.027.769 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Akumulasi Penyusutan | (2.059.759.097) | (2.537.832.288) | 478.073.191 |
| Nilai Buku Aset Tetap | 2.864.941.157 | 2.128.840.197 | 736.100.960 |

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp1.164.639.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.164.639.000 dan Rp. 1.164.639.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

| No. | KIB | Luas (m ²) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah |
|--------|-----|------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Jumlah | | | | | | 1.164.639.000 |

tidak ada perubahan nilai perolehan aset tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
1.303.725.854*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.303.725.854 dan Rp. 1.232.629.854

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------|
| Saldo per 31 Desember 2015 | 1.232.629.854 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 1.303.725.854 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 | (1.017.818.202) |
| Nilai Buku 31 Desember 2016 | 285.907.652 |

penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin tersebut adalah jumlah belanja

semester satu sebesar Rp. 248.775.000 sehingga menambah nilai aset peralatan dan mesin

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
2.267.452.450*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.267.452.450 dan Rp. 2.267.452.450.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------|
| Saldo per 31 Desember 2015 | 2.267.452.450 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 2.267.452.450 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 | (1.041.940.895) |
| Nilai Buku 31 Desember 2016 | 1.225.511.555 |

tidak ada perubahan nilai perolehan aset gedung dan bangunan

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2015 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |

| Mutasi Kurang | |
|---|---|
| Saldo per 31 Desember 2016 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 | 0 |
| Nilai Buku 31 Desember 2016 | 0 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
188.882.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 188.882.950 dan Rp. 1.951.181.

tidak ada perubahan nilai aset tetap lainnya

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Saldo per 31 Desember 2015 | 1.951.181 |
|---|-------------|
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 188.882.950 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 | 0 |
| Nilai Buku 31 Desember 2016 | 188.882.950 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(2.059.759.097) dan Rp(2.537.832.288).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 1.303.725.854 | (1.017.818.202) | 285.907.652 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 2.267.452.450 | (1.041.940.895) | 1.225.511.555 |
| 3 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 188.882.950 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 4.712.335.254 | (2.059.759.097) | 1.511.419.207 |

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi : Rp 7.700.000

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.164.000 dan Rp. 3.888.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

| No. | Debitur | Jumlah (Rp) |
|--------------|---------|-------------|
| Jumlah Total | | 3.164.000 |

Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|-------------|
| Saldo per 31 Desember 2015 | (3.888.000) |
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 3.164.000 |

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Penyisihan Piutang tak Tertagih – TP/TGR : Rp (19.440)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. (15.820) dan Rp. (19.440). Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

| No. | Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | Penyisihan (%) | Nilai Penyisihan |
|---------------------|---------|----------|---------------|----------------|------------------|
| Jumlah Total | | | | | (35.260)] |

Aset Lainnya:
Rp
(182.334.259)

C.4. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. (182.334.259) dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2016 | TA 2015 |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Aset tak Berwujud | | 0 |
| 2 | Aset Lain-lain | (130.655.259) | 0 |
| | Nilai perolehan Aset Lainnya | (130.655.259) | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (51.679.000) | 0 |
| | Nilai buku Aset Lainnya | (182.334.259) | 0 |

C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp
(130.655.259)

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. (130.655.259) dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo per 31 Desember 2015 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 31 Desember 2016 | (130.655.259) |

tidak ada perubahan nilai aset tetap lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp424.100*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 424.100 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 |
|---------------------|---------|---------|
| Uang Muka dari KPPN | 424.100 | 0 |
| Jumlah | 424.100 | 0 |

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 424.100*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 424.100 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:*

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.796.619.715

Rp
2.796.619.715

dan Rp2.055.945.628. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2016 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 740.674.087 (36,02%) dari nilai per 31 Desember TA 2015. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 2.796.619.715, sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 2.055.945.628

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP :
Rp15.385.053

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp15.385.053 dan Rp12.772.684. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|------------------|---|---------------------|------------|------|
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 4.623.410 | 0,00 |
| 2. | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara | 0 | 3.888.000 | 0,00 |
| 3. | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 0 | 6.873.643 | 0,00 |
| Total Pendapatan | | | 15.385.053 | 0,00 |

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
5.083.395.200

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.083.395.200 dan Rp4.801.990.898. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 1.860.607.440 | 1.653.583.000 | 207.024.440 | 12,51 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 25.182 | 22.469 | (4.306) | (14,60) |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 133.984.160 | 136.654.120 | (2.669.960) | (1,95) |
| Beban Tunj. Anak PNS | 39.897.556 | 36.358.098 | 3.539.458 | 9,73 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 31.590.000 | 26.130.000 | 5.460.000 | 20,89 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 2.258.290.000 | 2.254.800.000 | 3.490.000 | 0,15 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 265.217.622 | 297.146.131 | (31.928.509) | (10,74) |
| Beban Tunj. Beras PNS | 102.474.300 | 96.588.280 | 5.886.020 | 6,09 |
| Beban Uang Makan PNS | 291.156.000 | 282.911.000 | 8.245.000 | 2,91 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 24.280.000 | 22.630.000 | 1.650.000 | 7,29 |
| Beban Uang Lembur | 75.873.000 | 0 | 75.873.000 | 0,00 |
| Total Beban Pegawai | 5.083.395.260 | 4.806.830.117 | 276.565.143 | 5,75 |

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|--|---------|---------|-------------|---|
| Beban Persediaan Konsumsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| Total Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa : Rp Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Langganan Daya dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Pos dan Giro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Konsultan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|---|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Perjalanan Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|--|---------|---------|-------------|---|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Masyarakat/Pemda | | | | |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|---|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|---|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Jumlah Penyusutan | | | | |
| Beban Amortisasi Aset tak Berwujud | | | | |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain | | | | |
| Jumlah Amortisasi | | | | |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetap Lainnya | | | | |
| Total Beban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|--------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Surplus Penjualan Aset Non | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lancar | | | | |
| Penjualan Alat Angkut Darat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lancar | | | | |

| Penjualan Alat Kantor | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

E.4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---------------------------------------|----------|
| Barang Konsumsi | 0 |
| Suku Cadang | 0 |
| Barang Persediaan Lainnya | 0 |
| Total Koreksi Nilai Persediaan | 0 |

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|--------------------|----------|
| Koreksi beban | 0 |
| Koreksi Pendapatan | 0 |
| Koreksi Piutang | 0 |
| Koreksi Kewajiban | 0 |
| Koreksi hibah | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

| Transaksi antar Entitas | Nilai |
|----------------------------|----------|
| Diterima dari Entitas Lain | 0 |
| Ditagikan ke Entitas Lain | 0 |
| Transfer Masuk | 0 |
| Transfer Keluar | 0 |
| Pengesahan Hibah Langsung | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.796.619.715 dan Rp2.055.945.628

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Ungkapan lain : transaksi jurnal terkait belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (peralatan dan mesin yang belum diregister) karena belanja barang berupa gorden menggunakan akun belanja barang persediaan dengan nomor spm 00039 dengan nomor sp2d 160701301000669 tanggal 27 mei 2016, seharusnya dicatat sebagai aset menggunakan akun 523111 tidak bisa dilakukan revisi sehingga dilakukan jurnal penyesuaian terhadap akun tersebut.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

1. terdapat tagihan jasa pos untuk bulan desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000 namun akan dibayarkan januari 2016
2. terdapat tagihan PAM untuk bulan desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000 namun akan dibayarkan januari 2016

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah:

1. BRI Cabang Lubuklinggau A/C 012901001252305 a.n. BPg 070 Pengadilan Negeri 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0.
2. BRI Cabang Lubuklinggau A/C 012901000042309 a.n. BPg 070 Pengadilan Negeri 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

1. Perubahan POK dari akun belanja keperluan perkantoran disebabkan karena meningkatnya keperluan seperti ATK ,Internet dan keperluan sehari-hari lainnya

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

berdasarkan pemisahan panitera dan sekretaris tahun 2015 terjadi mutasi panitera
skretaris pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dimana semula :
Kuasa Pengguna Anggaran:Drs.SAMSIR,SH.MH
NIP : 19620414 198303 1 006
Menjadi :
Kuasa Pengguna Anggaran : PONIJAN,SH
NIP : 19710525 199303 1 003

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

| No. | Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Per 31 Desember 2015 | 2016 | Per 31 Desember 2016 | Per 31 Desember 2016 |
| A. | Peralatan dan Mesin | | | | | | |
| 1 | Alat Bantu | 7 | | | | | |
| 2 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 | | | | | |
| 3 | Alat Pengolahan | 4 | | | | | |
| 4 | Alat Kantor | 5 | | | | | |
| 5 | Alat Rumah Tangga | 5 | | | | | |
| 6 | Alat Komunikasi | 5 | | | | | |
| 7 | Alat Kedokteran | 5 | | | | | |
| 8 | Komputer Unit | 4 | | | | | |
| 9 | Peralatan Komputer | 4 | | | | | |
| B. | Gedung dan Bangunan | | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 | | | | | |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat | 50 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | Tinggal | | | | | | |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | | | |
| D. | Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | - | | | | | |
| E. | Aset Tetap yang Tidak Digunakan | | | | | | |
| 1 | Alat Kantor | 5 | | | | | |
| 2 | Alat Rumah Tangga | 5 | | | | | |
| 3 | Unit Alat Laboratorium | 8 | | | | | |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | | | |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya | | | | | | |

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*



005
01
1100
098970

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2016

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT